

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADIN KHAZANAH ILMU

Mohamad Rojii

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : [mohamadrojii1993@gmail.com](mailto:mohamadrojii1993@gmail.com)

## Abstrak

*Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, dan untuk dapat mengatur penggunaan biaya pendidikan dengan baik harus didasari dengan ilmu manajemen yang baik pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MADIN Khazanah Ilmu meliputi : (1) Sumber Pembiayaan Pendidikan, yang berasal dari pemerintah daerah berupa BOSDA MADIN, iuran wali santri, dan bantuan masyarakat. (2) perencanaan Pembiayaan Pendidikan, perencanaan pembiayaan pendidikan di MADIN khazanah ilmu, dapat di bagi menjadi dua garis besar yaitu perencanaan terkait anggaran yang bersumber dari pemerintah dan Perencanaan anggaran yang bersumber dari orang tua dan masyarakat (3) Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan, di laksanakan dengan mengalokasikan anggaran pada semua pos, baik yang berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung. (4) Pengawasan Pembiayaan Pendidikan, pengawasan di lakukan oleh dua pihak yaitu pihak dari luar yang meliputi oleh badan pengawas pengalokasian anggaran BOSDA MADIN dan insentif guru MADIN. Dan pengawasan dari pihak dalam yang meliputi penanggung jawab keuangan yayasan bersama dengan kepala MADIN.*

**Key words :** *Manajemen Pembiayaan Pendidikan , Madrasah Diniyah*

## PENDAHULUAN

Untuk mengetahui dan memahami banyak hal, sesungguhnya manusia membutuhkan alat yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai mata untuk melihat dunia, yang membuat manusia dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu banyak hal. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mendatangi tempat-tempat yang di dalamnya dilaksanakan proses pendidikan, proses pendidikan berbeda dengan sekedar belajar, karena belajar hanya sebagai proses transfer ilmu, sedangkan dalam pendidikan terjadi proses transfer ilmu, nilai, dan keterampilan. Dalam dunia pendidikan sendiri telah menghadirkan berbagai macam lembaga pendidikan dengan corak dan karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. (Oktafia & Basith, 2017)

Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting pada sebuah negara, bahkan dengan memperbaiki pendidikan dapat dikatakan bahwa sebuah negara telah berinvestasi bagi masa depan bangsanya, pendidikan juga merupakan tolak ukur kemajuan sebuah bangsa, maka dapat dikatakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang baik bidang pendidikannya, dengan demikian maka tujuan dan cita-cita sebuah negara dapat di tempuh salah satunya adalah lewat jalur pendidikan, pendidikan yang baik, berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci utama kemajuan sebuah bangsa. (Suprapti, 2014)

Urgensi pendidikan bagi sebuah negara juga telah diantisipasi oleh Indonesia dengan penerbitan undang-undang tentang pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan, dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pendidikan, Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan merupakan komponen utama dalam pengembangan sumberdaya manusia, karena segala aktivitas yang dijalani oleh manusia selalu berkaitan dengan pendidikan, bahkan pendidikan telah didapatkan manusia sejak dia dalam kandungan hingga dia dewasa dan menua, proses pendidikan yang dapatkannya meliputi pendidikan formal dan non formal, pendidikan langsung dan tidak langsung, melalui pendidikan manusia menjadi makhluk yang berpengetahuan, beradab dan bermoral. (Masditou, 2017)

Dalam usaha pencapaian kualitas pendidikan sesuai yang diharapkan, pendidikan memiliki standar acuan yang harus dipenuhi oleh seluruh elemen yang ada di sebuah lembaga pendidikan, standar ini sebagai acuan agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai, standar-standart yang dimaksudkan di atas adalah sebagaimana berikut : Standart Kompetensi lulusan, standart isi,

standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan pendidikan, dan standart penilaian pendidikan. kedelapan standar di atas telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai tolak ukur penilaian sebuah lembaga pendidikan lewat program akreditasi.(Masditou, 2017)

Dari kedelapan standar pendidikan yang telah di tetapkan di Indonesia, standar pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan program pendidikan, segala sumber pendapatan pembiayaan pendidikan perlu di hitung dan dikelola dengan baik demi keberlangsungan program pendidikan pada masing-masing lembaga/sekolah, (Winarsih, 2013)

Pembiayaan dalam pendidikan merupakan faktor yang terpenting, bahkan dapat di katakan bahwa mustahil program pendidikan dapat di jalankan tanpa adanya Pembiayaan atau biaya pendidikan, permasalahan Pembiayaan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pendidikan, seluruh komponen dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dari komponen pembiayaan, meskipun tidak semua komponen biaya akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pendidikan.(Baihaqi, 2012)

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak akan dapat di jalankan tanpa adanya biaya, dan pembiayaan pendidikanpun tidak akan dapat di salurkan dan dipergunakan dengan maksimal tanpa adanya tata kelola Pembiayaan yang baik, maka manajemen pembiayaan pendidikan yang baik menjadi kewajiban bagi setiap lembaga pendidikan. bahkan di beberapa lembaga pendidikan telah membuat terobosan baru dengan mengembangkan bisnis unit usaha sekolah atau pondok pesantren, hal ini di lakukan sebagai upaya menstabilkan keuangan di lembaga, usaha yang di kembangkan di berbagai

macam sektor, baik berupa sektor makanan dengan mendirikan kantin atau koperasi, sektor perternakan dengan usaha jual beli hewan ternak maupun susu perah, ada pula yang bergerak di bidang percetakan dll.(Oktafia, 2018)

Salah satu tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk mengusahakan tercapainya produktivitas dalam pendidikan, dimana produktivitas senantiasa di nilai dari nilai ekonomi setiap kegiatan yang ada di sekolah, yakni bagaimana mencapai hasil yang semaksimal mungkin dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin, produktivitas dalam pendidikan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, dalam konsep produktivitas pendidikan, di perlukan pepaduan antara sumber-sumber biaya pendidikan yang ada dengan berbagai macam cara, perpaduan tersebut memerlukan teknis khusus yang wajib di kuasai, segala macam upaya yang di lakukan demi tercapainya produktivitas pendidikan tersebut memerlukan manajemen yang baik, agar tujuan yang telah di rumuskan dapat tercapai secara maksimal.(Baihaqi, 2012)

Dalam manajemen pembiayaan pendidikan jelas memerlukan penanganan yang berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan yang ada, dalam penelitian ini saya mencoba untuk mencari data dan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang manajemen pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan yang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu MADIN, lembaga yang menjadi objek penelitian saya adalah MADIN Khazanah Ilmu yang berada di desa Wage, Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini nantinya akan mencoba untuk mengupas secara detail tentang bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan pada lembaga MADIN dengan mengambil contoh manajemen pembiayaan

pendidikan yang ada di sebuah MADIN. dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat luas khususnya mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan dan pada MADIN khususnya, untuk nantinya dapat mengembangkan pola manajemen yang terbaik bagi lembaga pendidikan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian dalam Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), Sedangkan Menurut sifat datanya penelitian ini termasuk penelitian “kualitatif”, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik, wawancara, dokumentasi dan observasi, responden dalam wawancara meliputi, kepala madrasah, penanggung jawab keuangan yayasan dan staff keuangan madrasah, sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi bahan rujukan penggalan data adalah segala macam dokumen sekolah yang ada kaitanya dengan profil dan keuangan madrasah.

Sedangkan dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisis data dengan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman yang mana mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai mendapatkan kesimpulan data penelitian secara tuntas, hingga datanya sudah jenuh dan tidak ada kemungkinan untuk berubah pada kesimpulan yang lainnya atau yang bertolak belakang. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi serta kenaikan kesimpulan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen dalam arti secara umum berasal dari bahasa Inggris ‘*Administrasion*’ yang di beri makna “*the Management of executive affairs*” yang berarti manajemen urusan eksekutif, selain itu manajemen juga berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola, pengelolaan di lakukan melalui proses dan di kelola menurut urutan dan fungsi daripada manajemen itu sendiri, di samping pengertian di atas ada beberapa pengertian dari manajemen yang telah banyak di sampaikan oleh para ahli, di antaranya adalah, Hasibuan, Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah suatu disiplin ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya demi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, menurut GR Terry, manajemen merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien, efektif berarti bahwa tujuan dapat di capai sesuai perencanaan, sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang di berikan di laksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya. (Mustari, 2013)

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengertian manajemen madalah sebuah proses yang panjang dan terstruktur secara

sistematis meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan pengendalian dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sehingga secara lebih jelas dapat diuraikan bahwa manajemen merupakan suatu proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih secara formal, manajemen dilaksanakan dengan bantuan sumber-sumber yang meliputi, sumberdaya manusia, material, biaya, informasi, dan lain sebagainya, manajemen dilaksanakan dengan metode kerja tertentu yaitu efisien dan efektif dari segi tenaga, biaya, waktu dan lain sebagainya, manajemen selalu mengacu pada tujuan tertentu yang telah dirumuskan dan disepakati sebelumnya. (Hamalik, 2007)

Oemar Hamalik mengatakan dalam bukunya "manajemen pengembangan kurikulum", bahwa manajemen memiliki unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, unsur-unsur dari manajemen tersebut terdiri dari : Man, Money, Method, Machines, Materials, dan Market yang beliau singkat dengan 6M, ketika dijelaskan lebih rinci lagi, bahwa dalam manajemen yang diatur adalah ke enam unsur di atas, tujuan diaturnya adalah agar unsur-unsur tersebut lebih bermanfaat dalam proses pencapaian tujuan dan bermanfaat secara optimal, terkoordinasi dan reintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi, dan yang mengaturnya adalah pimpinan puncak, manajer dan supervisor dengan melakukan kegiatan sesuai urutan sesuai fungsi daripada manajemen tersebut. (Hamalik, 2007).

Manajemen memiliki khususnya dalam pendidikan, fungsi pokok dari manajemen pendidikan sendiri dapat dibagi menjadi 4 fungsi pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, Perencanaan, yang memiliki dua fungsi



utama, yaitu, yang pertama, mengupayakan secara sistematis terhadap proses penyusunan rangkaian tindakan yang akan di kerjakan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia, Kedua, mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif demi tercapainya tujuan yang telah di tetapkan. Kedua, Pelaksanaan, merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Ketiga, Pengawasan, merupakan sebuah kegiatan dengan berupaya melakukan pengamatan secara sistematis dan berkesinambungan, mencatat, meberikan penjelasan, pembinaan, dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta berupaya mencarikan solusinya. Keempat, Pembinaan, merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya secara tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. (Hamalik, 2007)

Sedangkan Manajemen dalam konteks pembiayaan pendidikan tidak jauh berbeda dengan konsep dasar daripada manajemen itu sendiri yang memiliki fungsi dari perencanaan hingga pengawasan atau evaluasi, dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan komponen yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan, pembiayaan merupakan komponen produksi yang menentukan setiap kegiatan yang ada di lembang pendidikan, komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan seara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Sehingga dalam hal pengelolaan perlu dilakukan manajemen keuangan yang baik.(Nafisah, 2013)

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah, manajemen pembiayaan pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara continue terhadap biaya pendidikan operasional sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu tujuan pendidikan. manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara continue terhadap biaya pendidikan operasional sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu tujuan pendidikan.(Nafisah, 2013)

## **2. Konsep Pembiayaan Pendidikan**

Menurut keterangan para pakar, Pembiayaan merupakan salah satu dari tujuh konsep penting yang terkait dengan pembiayaan. Tujuh konsep tersebut adalah obyek biaya, informasi manajemen biaya, pembiayaan, keuangan, Pembiayaan, biaya, dan pemicu biaya. Pembiayaan adalah suatu instrumen yang dibuat guna memfasilitasi perencanaan. Pembiayaan juga menggambarkan

konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah yang tepat dengan tujuan mencapai target yang ditetapkan. (Maisah, 2013).

Adapun pengertian Pembiayaan itu sendiri, para ahli mendefinisikannya dengan redaksi yang beraneka ragam. Menurut Muhaimin, Pembiayaan dapat diartikan sebagai rencana yang diformulasikan ke dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu (periode) tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. (Muhaimin, 2012)

Udin Syaipuddin mengemukakan bahwa makna Pembiayaan adalah alat bagi pemerintah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, guna meningkatkan kualitas hidup rakyat. (Maisah, 2013) Sementara Djamiluddin menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah suatu rencana yang menjelaskan sekumpulan tindakan atau aktifitas dalam bentuk angka-angka berupa uang yang akan digunakan dalam kurun waktu tertentu. (Suharsaputra, 2010)

Sedangkan Nanang Fattah mendefinisikan Pembiayaan sebagai suatu rencana operasional dalam bentuk satuan uang yang dijadikan oleh suatu lembaga sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam jangka waktu tertentu. (Fattah, 2012) Tidak jauh berbeda dengan pendapat para pakar sebelumnya Governmental Accounting Standards Board (GASB) mendefinisikan Pembiayaan sebagai rencana operasional keuangan yang berisi tentang estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam kurun waktu tertentu. (Suhandi, 2016)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan uang akan tetapi juga memberikan informasi terkait

rencana kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan beserta waktu pelaksanaannya. Dalam Pembiayaan setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan disertai besar Pembiayaan yang akan dialokasikan, sehingga ada dua hal yang penting untuk diperhatikan yaitu kegiatan itu sendiri dan besarnya dana untuk membiayai kegiatan tersebut.

Kemudian di dalam Pembiayaan terdapat dua sisi penting yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan menjelaskan tentang sumber diperolehnya dana. Sedangkan sisi pengeluaran menunjukkan alokasi besarnya biaya untuk setiap komponen yang harus dibiayai. (Suharsaputra, 2010)

Karena Pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan suatu lembaga, maka diharapkan bagi penanggung jawab setiap kegiatan untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Pembiayaan yang telah ditentukan sebelumnya. Seorang penanggung jawab kegiatan harus mencatat Pembiayaan serta melaporkan apa yang telah terealisasi sehingga nantinya dapat dikomparasikan selisih antara Pembiayaan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kemudian menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. (Muhaimin, 2012)

Aanggran Pembiayaan merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya. Maka dapat dikatakan bahwa Pembiayaan berfungsi sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Anggaran Pembiayaan memiliki banyak fungsi, di antara fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut: Perencanaan, Fungsi ini bisa membantu unit kerja mengetahui ke mana arah kebijakan yang nanti akan dilakukan dengan melihat kepada anggaran yang tersedia. Pengendalian, fungsi ini dapat menghindari munculnya pengeluaran yang tidak perlu dan berlebihan (pemborosan) kemudian dapat pula menghindari digunakannya Anggaran Pembiayaan yang tidak proporsional, maksudnya adalah Pembiayaan yang tidak tepat guna, tidak efektif, dan tidak efisien sebagaimana yang diharapkan. Alat koordinasi dan komunikasi, dokumen Pembiayaan yang baik dan komprehensif dapat mengkoordinir apa saja tugas yang harus dilakukan oleh bagian-bagian atau unit-unit kerja lainnya. Sehingga tidak akan ada tugas-tugas ganda atau semua urusan akan terdistribusikan dengan baik ke semua lini lembaga. Alat penilaian kerja, melalui Anggaran Pembiayaan ini dapat diketahui apakah setiap unit atau bagian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Karena dalam penyusunan rencana kerja telah disesuaikan dengan anggaran pembiayaan yang dibutuhkan, maka efektif tidaknya pelaksanaan kegiatan dapat terlihat dari penggunaan Anggaran pembiayaan dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Alat efisien dan motivasi, suatu anggaran pembiayaan hendaknya tidak terlalu besar sehingga sulit untuk dibiayai, dan juga tidak terlalu rendah sehingga sulit untuk dilaksanakan. Namun Anggaran pembiayaan harus tepat dan efisien sehingga menjadi motivasi bagi para anggota di lembaga untuk bekerja secara optimal karena didukung dengan Anggaran pembiayaan yang proporsional. Alat otorisasi, fungsi Anggaran pembiayaan sebagai alat otorisasi ini memberikan pengelola lembaga kewenangan untuk

menggunakan dana atau mengestimasi anggaran pembiayaan yang dibutuhkan secara ideal, sehingga dapat dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan dengan mudah.(Alwildayanto, 2017)

Khusus pembiayaan pada bidang pendidikan lewat undang-undang, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkenaan dengan pembiayaan pendidikan, yaitu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, bab ke XIII Pasal 46-49, di mana di dalamnya di nyatakan tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan, di dalamnya juga dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat, dalam aturan ini jelas peran masyarakat tidak dapat di kesampingkan, masyarakat harus memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan pendidikan di daerah sekitar mereka, dan masyarakat juga harus di bedakan dengan keluarga/orang tua peserta didik, partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat di lembagakan dalam bentuk dewan pendidikan daerah dan komite sekolah pada setiap lembaga pendidikan yang ada.(Syakdiah, 2005)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sumber Pembiayaan Pendidikan MADIN Khazanah Ilmu**

Hasil Penelitian tentang Sumber pembiayaan pendidikan di MADIN khazanah Ilmu dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu : (1) Pemerintah, selama ini anggaran pembiayaan MADIN yang di terima dari pemerintah masih sebatas dari pemerintah daerah, baik melalui dinas pendidikan maupun dari kementerian agama pada tingkat kabupaten. Dana bantuan dari dinas pendidikan

berupa BOSDA MADIN (Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk MADIN) dengan besaran Rp. 1.350.000 yang keluar setiap tiga bulan. Dan Dana insentif untuk guru madin sejumlah Rp, 300.000?bulan dan akan cair setiap tiga bulan dengan nominal Rp. 900.000 untuk satu orangnya. Untuk bantuan dari kemenag kabupaten, berupa anggaran-anggaran kegiatan yang mencakup tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Sedangkan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat masih dalam bentuk wacana yang sedang di konsep oleh pihak-pihak terkait dan belum terealisasi hinggahari ini. (2) Orang Tua wali santri, Sumber pembiayaan yang berasal dari wali santri berupa uang pendaftaran, uang infaq bangunan, dan SPP setiap bulannya. Biaya dari wali santri juga berupa segala biaya yang di keluarkan khusus untuk anak-anak mereka sebagai penunjang kegiatan pendidikan di MADIN, semisal biaya seragam, uang saku, dan anggaran rekreasi (3) Masyarakat, Sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat berupa bantuan tunai dan non tunai dengan bentuk yang bermacam-macam, bantuan tersebut dapat di alokasikan untuk pembangunan, beasiswa santri miskin, maupun untuk penunjang proses pembelajaran.

### **Perencanaan Pembiayan Pendidikan MADIN Khazanah Ilmu**

Untuk perencanaan pembiayaan pendidikan di MADIN khazanah ilmu, dapat di bagi menjadi dua garis besar, (1) perencanaan terkait anggaran yang bersumber dari pemerintah, dan (2) Perencanaan anggaran yang bersumber dari orang tua dan masyarakat.

Untuk perencanaan anggaran yang bersumber dari pemerintah, mekanismenya melalui pembuatan proposal pengajuan Pembiayaan pendidikan selama 3 bulan, yang di dalamnya mencakup dana kegiatan dan dana pembelian

keperluan pembelajaran non bangunan. Pengajuan proposal melalui koordinator MADIN yang ada di kecamatan untuk selanjutnya akan di serahkan kepada dinas pendidikan di kabupaten untuk melewati tahap pemeriksaan hingga pencairan.

Sedangkan perencanaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua dan masyarakat adalah dengan sistem penyusunan (RAPBM) yang di lakukan setiap enam bulan sekali atau pada setiap semester, di mana dalam penganggaran tersebut mencakup besaran biaya kegiatan belajar mengajar yang di butuhkan dalam satu semester, pembelian buku dan ATK, biaya gaji pendidik dan tendik, biaya pelengkapan sarana dan prasarana serta biaya operasional MADIN yang meliputi pembayaran Air, listrik dan sewa gedung.

#### **Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan MADIN Khazanah Ilmu**

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah Khazanah Ilmu, seluruh anggaran yang masuk di kelola khusus oleh Ahli manajemen keuangan dari pihak institusi/yayasan yang bekerja sama dengan kepala madrasah dan staf keuangan, adapun prosentase terbesar sumber pemasukan keuangan di Madrasah Diniyah Khazanah Ilmu adalah dari Dana iuran Siswa yang berupa iuran bulanan/SPP, Iuran Tahunan yang berupa uang Daftar Ulang, dan iuran kegiatan-kegiatan tambahan.

Pengalokasian anggaran keuangan di Madrasah Diniyah Khazanah Ilmu di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dana bantuan yang berasal dari Luar, sekolah mengalokasikan dana tersebut berdasarkan juknis yang telah di tetapkan oleh pihak pemberi dana. Seluruh anggaran yang masuk akan di kelola oleh pihak keuangan di dalam institusi yang juga sebagai pihak pengembang yayasan dengan bekerja sama dengan kepala sekolah dan staff keuangan di



madrshah, adapun laporan pertanggung jawaban pengalokasian anggaran sepenuhnya di serahkan kepada pihak sekolah yang di kerjakan oleh staff khusus dan di tanda tangani oleh kepala madrasah.

Anggaran-anggaran yang masuk di alokasikan pada semua pos, baik yang berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung, biaya langsung meliputi segala biaya yang di keluarkan untuk terlaksananya proses belajar mengajar di MADIN, yang berupa alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, dan biaya operasional yang lainnya, sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya-biaya yang di keluarkan di luar perencanaan awal demitercapainya kualitas ataupun kuantitas dari hasil belajar yang ingin di capai.

#### **Pengawasan Pembiayaan Pendidikan MADIN Khazanah Ilmu**

Dalam pengawasan pembiayaan pendidikan sesuai yang di sampaikan oleh Nanang fattah bahwa prosedur pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: memantau (monitoring), menilai, dan melaporkan hasil temuan kegiatan monitoring terhadap kinerja aktual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya.(Fattah, 2012). Di MADIN khazanah Ilmu proses pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh badan pengawas pengalokasian anggaran BOSDA MADIN dan insentif guru MADIN yang di lakukan oleh petugas koordinator kecamatan, petugas dari kemenag, dan petugas dari dinas pendidikan kabupaten. Pengawasan dilakukan dengan Pemantauan, pembiaan dan penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan pelaporan penggunaan anggaran yang telah di terima. Laporan yang di serahkan berupa laporan tertulis lengkap dengan detail pengeluaran dan bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota pembelian, laporan di buat dan di serahkan setia tiga bulan.

Sedangkan pengawasan anggaran di luar anggaran pemerintah, akan dilakukan oleh petugas keuangan yayasan bersama kepala madrasah, dengan meminta draf laporan pertanggung jawaban anggaran secara tertulis baik berupa file maupun soft file. Kemudian laporan tersebut di tindak lanjuti dengan pemeriksaan dan evaluasi serta di gunakan sebagai acuan penganggaran pada semester yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Impelementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MADIN Khazanah Ilmu meliputi : (1) Sumber Pembiayan Pendidikan, yang berasal dari pemerintah daerah berupa BOSDA MADIN, iuran wali santri, dan bantuan masyarakat. (2) perencanaan Pembiayan Pendidikan, perencanaan pembiayaan pendidikan di MADIN khazanah ilmu, dapat di bagi menjadi dua garis besar yaitu perencanaan terkait anggaran yang bersumber dari pemerintah yang di laksanakan setiap 3 bulan dan Perencanaan anggaran yang bersumber dari orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan setiap 6 bulan (3) Pelaksanaan Pembiayan Pendidikan, di laksanakan dengan mengalokasikan anggaran pada semua pos, baik yang berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung, biaya langsung meliputi segala biaya yang di keluarkan untuk terlaksananya proses belajar mengajar di MADIN, yang berupa alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, dan biaya operasional yang lainnya, sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya-biaya yang di keluarkan di luar perencanaan awal

demitercapainya kualitas ataupun kuantitas dari hasil belajar yang ingin di capai.

(4) Pengawasan Pembiayaan Pendidikan, pengawasan di lakukan oleh dua pihak yaitu pihak dari luar yang meliputi oleh badan pengawas pengalokasian anggaran BOSDA MADIN dan insentif guru MADIN yang di lakukan oleh petugas koordinator kecamatan, petugas dari kemenag, dan petugas dari dinas pendidikan kabupaten. Dan pengawasan dari pihak dalam yang meliputi penanggung jawab keuangan yayasan bersama dengan kepala MADIN. Semua bentuk pengawasan di lakukan dengan permintaan bukti laporan penggunaan anggaran dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baihaqi. (2012). Pembiayaan, Manajemen Pada, Pendidikan Negeri, Smk Kabupaten, Di Besar, Aceh. *Pencerahan*, 6, 1–9.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*, Vol. 2(20), 119–145.
- Nafisah, D. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Masrasah Aliyah. *Economic Education Analiyis Journal*, 2(1), 18–23.
- Oktafia, R. (2018). *Poverty Alleviation : An Economic Practice Study of Islamic Culture*. 98(Icpsuas 2017), 345–348.
- Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Ekonmi Islam*, 8(1), 71–86.

Suprapti. (2014). Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di Era Otonomi Daerah.  
*Religi ;Jurnal Studi Islam*, 5(April), 102–123.

Syakdiah. (2005). Pendanaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 9, pp. 109–122.

Winarsih, S. (2013). Sistem Pembiayaan Pendidikan Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Insania*, 18(No.2), 265–286.

Mustari, (2013) Manajemen Pendidikan Dalam Konteks Indonesia, (Bandung :  
Arsad Press)

Oemar Hamalik, (2007) Manajemen Pengembangan Kurikulum”, (Bandung :  
Remaja Rosdakarya)

Syakdiah. (2005). Pendanaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 9.

Arwildayanto. (2017) Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan,  
Bandung: Widya Padjajaran.

Uhar Suharsaputra, (2010) Administrasi Pendidikan (Bandung: Refika Aditama.

Nanang Fattah, (2012) Standar Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja  
Rosdakarya.

Achmad Suhandi, (2016) Skripsi: Kemampuan Kepala Sekolah dalam Menyusun  
RAPBS di SMK Karya Bangsa Nusantara Solear Tangerang, Jakarta: UIN  
Syarif Hidayatullah Jakarta.

Maisah, (2013) Manajemen Pendidikan, Ciputat: Gaung Persada.

Muhaimin, (2012) Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media.

